

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dan Jurnal

- Hirwansyah, E. M. (2023). Kebijakan Penerbitan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Krtha Bhayangkara*.
- Kementerian ATR/BPN, *Laporan Tahunan Kinerja Pertanahan (Jakarta: ATR/BPN, 2023)*, diakses 12 Mei 2025. (t.thn.).
- Lumbanraja, R. A. (2020). Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. *Notarius*.
- Mansyur, M. I. (2023). Urgensi Penerapan Sertifikat Tanah Secara Elektronik. *Jurnal Ilmiah Kenotariatan*.
- Maruapey, M. H. (2017). Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*.
- Mohd. Yusuf DM, A. K. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*.
- Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi dari Kertas ke Elektronik: Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*.
- Mujiburohman, D. W. (2023). Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Al'Adl: Jurnal Hukum*.
- Nafan, M. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik Sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Ni Kadek Erna Dwi Julyianti, I. M. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Digital Dikatkan dengan Keamanan Data Pribadi. *Jurnal Preferensi Hukum*.
- Nurmawati, K. H. (2023). Sertifikat-El Sebagai Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*.
- Pidada, N. K. (2024). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Penerbitan

Sertifikat Tanah Elektronik. *Student Research Journal*.

Rubiati, F. F. (2022). Jaminan Kepastian Hukum Konversi Sertifikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian. *UMS Law Review*.

Sembiring, J. J. (2010). *Paduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visi Media.

Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*.

Sholeh, M. C. (2021). Analisis Yuridis Resiko Pemalsuan Terhadap Pengadaan Sertipikat Elektronik di Indonesia.

Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau: Dotpus Publisher.

Tiffany J. Monalu, T. F. (2023). Kedudukan Yuridis Penerbitan Sertipikat Tanah ke Sistem Elektronik Sebagai Jaminan Keamanan. *Lex Privatum*.

Wandebori, N. H. (2021). Problematika Transformasi Sertipikasi Tanah Digital. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*.

Skripsi

Pravitasari, D. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Serang Tahun 2017*. Banten: Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja,

Pasal 1 Ayat 2. (t.thn.).

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, Pasal 1 Ayat 9. (t.thn.).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 Ayat 1. (t.thn.).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 4 Ayat 2. (t.thn.).

Wawancara

Wawancara dengan Azhar Rahardiyanto Anwar, S.H., Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor BPN, 3 Februari 2025. (t.thn.).

Wawancara dengan Mbak Hetty, warga Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, 16 Februari 2025. (t.thn.).

Wawancara dengan Tyas Agustina, warga Kelurahan Kembangarum, 20 Januari 2025. (t.thn.).